BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia tersebut agar lebih bermartabat. Karena itu negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada setiap warga tanpa terkecuali warga negara yang memiliki perbedaan secara fisik dan mental, atau yang sering disebut dengan anak berkebutuhan khusus (ABK) sesuai dengan yang tercantum pada UUD 1945 pasal 31 ayat 1. Akan tetapi sistem pendidikan untuk ABK selama ini secara tidak langsung telah mendeskriminasikan ABK dengan masyarakat luas.

Sistem pendidikan untuk ABK yang ada selama ini disesuaikan dengan derajat dan jenis kebutuhan ABK. Terdapat dua macam pendidikan untuk ABK, yaitu Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Pendidikan Terpadu. SLB menampung jenis ABK yang sama, sedangkan pendidikan terpadu merpuakan sekolah biasa yang menampung ABK dengan kurikulum, guru, sarana, pengajaran, dan kegiatan belajar mengajar yang sama sengan sekolah umumnya, sehingga ABK dituntut untuk mengikuti peraturan sekolah, bukan sekolah yang menyesuaikan dengan ABK. Jelas sistem pendidikan ini telah menghambat para ABK untuk dapat belajar menghormati realitas keberagaman dalam masyarakat.

Seiring dengan berkembangnya tuntutan kelompok ABK dalam menyuarakan hak-hak ABK tersebut, akhirnya dalam rangka mensukseskan wajib belajar sembilan tahun, muncul konsep pendidikan baru untuk ABK dimana ABK disetarakan dengan anak non ABK, tidak didiskriminasi lagi di dalam satu ruang lingkup sekolah. Konsep ini juga ditujukan untuk ABK yang telah memasuki sekolah umum (SD/SMP/SMA) tetapi belum mendapatkan pelayanan khusus atau ABK yang belum sempat merasakan pendidikan sama sekali karena tidak diterima di sekolah umum. Konsep pendidikan baru ini disebut dengan pendidikan inklusi.

Salah satu sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi ini adalah SMK Balai Perguruan Putri (BPP) Bandung. SMK BPP yang beralamatkan di jalan Van De Verter no. 14 Bandung merupakan sekolah swasta dibawah naungan Yayasan Balai

Perguruan Putri. Sekolah ini merupakan sekolah pertama di Jawa Barat yang menggunakan pendidikan inklusi untuk jenjang SMA/SMK. SMK BPP Bandung merupakan sekolah reguler yang ditunjuk pemerintah sebagai sekolah inklusi pada tahun 2005 untuk memfasilitasi bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang sama, baik anak berkebutuhan khusus (ABK) maupun non ABK.

SMK BPP Bandung memiliki lima jurusan, yaitu Tata Boga, Tata Busana, Rekayasa Perangkat Lunak (RPL), Perhotelan, dan Administrasi perkantoran. Untuk saat ini, jurusan yang menerima ABK adalah jurusan Tata Boga, Tata Busana, dan RPL saja. Jenis ABK yang diterima di sekolah ini adalah tunarungu, tunadaksa, dan tunagrahita ringan. Pemilihan jenis ABK didasarkan atas banyaknya ABK tunarungu, tunadaksa, dan tunagrahita dalam kurun waktu sepuluh tahun belakanganan ini di kota Bandung. Kurikulum yang sekolah ini gunakan adalah kurikulum sekolah regular (KTSP) yang telah dimodifikasi sesuai dengan karakteristik ABK yang diterima di sekolah ini.

Pada hakekatnya SMK BPP yang menggunakan sistem pendidikan inklusi ini memiliki banyak keistimewaan dan keunggulan dibandingkan sekolah yang ditujukan untuk ABK lainnya, namun dalam prakteknya masih menyisakan banyak permasalahan. Pada awal munculnya sekolah inklusi, pemerintah sangat antusias mengenalkan pendidikan inklusi kepada msyarakat, tetapi sekarang ini pemerintah lupa akan pendidikan inklusi. Hal ini membuat masyarakat sekarang ini tidak mengetahui apa itu pendidikan inklusi. SMK BPP juga tidak memberikan informasi yang menjelaskan bahwa sekolah ini merupakan sekolah inklusi, sehingga masyarakat menanggap SMK BPP adalah SMK regular saja. Ditambah lagi dengan tidak adanya informasi mengenai metode-metode pengajaran yang SMK BPP gunakan dalam mengajarkan pendidikan inklusi membuat masyarakat tidak tertarik dengan SMK BPP dan lebih memilih sekolah khusus lainnya, seperti halnya SLB, yang lebih jelas proses pengajarannya dikarenakan pendidikan SLB sudah ada jauh sebelum pendidikan inklusi muncul.

I.2 Identifikasi Masalah

Dari penjelasan yang telah diungkapkan sebelumnya, dapat diuraikan menjadi beberapa bagian permasalahan yaitu :

- Tidak adanya bantuan dari pemerintah dalam mengenalkan pendidikan inklusi membuat SMK BPP harus berjuang sendiri untuk mengenalkan sistem pendidikan inklusi kepada masyarakat.
- Tidak adanya informasi yang menjelaskan bahwa SMK BPP adalah sekolah inklusi membuat masyarakat menganggap SMK BPP adalah SMK regular biasa.
- Tidak adanya informasi mengenai metode pengajaran pendidikan inklusi yang diterapkan SMK BPP membuat msyarakat tidak tertarik dengan pendidikan inklusi SMK BPP.
- Tidak adanya informasi mengenai jenis ABK dan jurusan yang menerima ABK di SMK BPP membuat masyarakat mengira bahwa semua jenis ABK dapat mendaftar ke sekolah ini dan dapat masuk ke jurusan apapun.
- Terdapatnya sekolah lain yang menerima ABK seperti halnya SLB, menjadi pesaing bagi SMK BPP yang menggunakan sistem pendidikan inklusi.

I.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diangkat dalam perancangan ini adalah bagaimana agar informasi mengenai SMK BPP dapat sampai ke masyarakat, utamanya bagi orang tua yang memiliki ABK, agar masyarakat mengetahui bahwa SMK BPP adalah sekolah inklusi yang menerima ABK serta paham akan sistem pendidikan inklusi yang diterapkan SMK BPP.

I.4 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam perancangan ini lebih difokuskan pada informasi yang tidak sampai ke masyarakat, khususnya bagi orang tua yang memiliki ABK, mengenai SMK BPP sebagai sekolah inklusi di Jawa Barat, khususnya kota Bandung. Jenis ABK yang dibahas dalam perancangan ini adalah tunarungu, tunadaksa, dan tunagrahita ringan.

I.5 Tujuan Perancangan

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, tujuan perancangan ini adalah :

- Masyarakat menjadi tahu kalau SMK BPP merupakan sekolah inklusi yang juga menerima ABK bersekolah disekolah tersebut.
- Masyarakat mendapatkan informasi mengenai pendidikan inklusi yang diterapkan oleh SMK BPP.
- Masyarakat menyadari akan keunggulan yang dapat diberikan SMK BPP sebagai sekolah inklusi dibanding dengan sekolah khusus lainnya.